

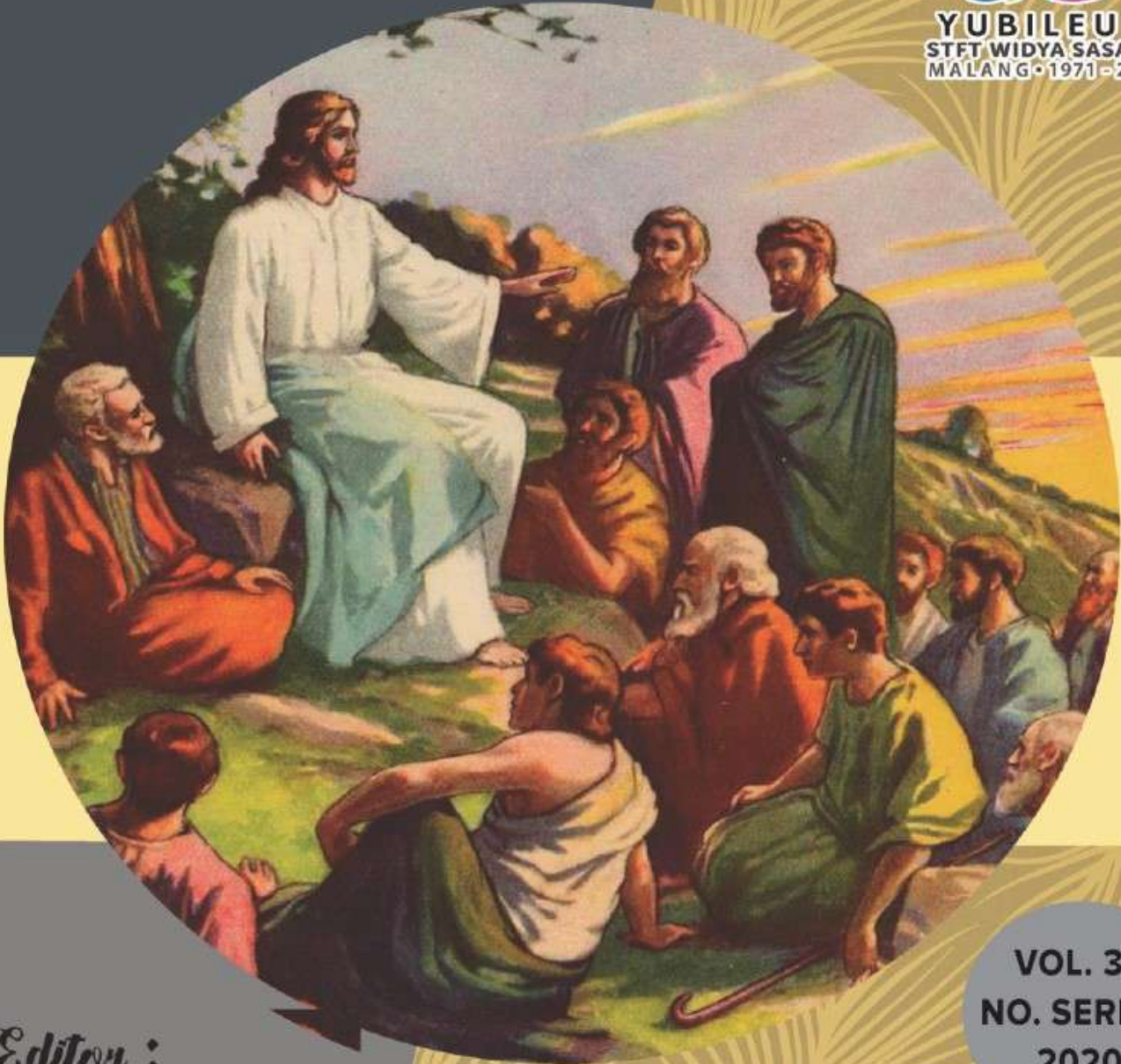
# PROSIDING

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana

ISSN 1411-9005



YUBILEUM  
STFT WIDYA SASANA  
MALANG • 1971 - 2021



*Editor :*

✦ F.X. Kurniawan

✦ Markus Situmorang

✦ Charles Virgenius

Setiawan

VOL. 30  
NO. SERI 29  
2020

*Kamu adalah*  
**Sahabatku**

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana  
ISSN 1411 - 9005

# **KAMU ADALAH SAHABATKU**

Editor:  
**F.X. Kurniawan**  
**Markus Situmorang**  
**Charles Virgenius Setiawan**

STFT Widya Sasana  
Malang 2020

# **KAMU ADALAH SAHABATKU**

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

E-mail: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com)

*Website: [www.stfwidyasasana.ac.id](http://www.stfwidyasasana.ac.id); [www.stftws.org](http://www.stftws.org)*

**ISSN: 1411-9005**

## DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA  
VOL. 30, NO. SERI NO. 29, TAHUN 2020

Pengantar	
<i>Tim Editor</i> .....	i
Daftar Isi .....	vii

### PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF FILOSOFIS

Persahabatan Merespon Tanda-tanda Zaman (Analisis Historiografis <i>Duc in Altum</i> Kolaborasi STFT Widya Sasana)	
<i>F.X. Armada Riyanto</i> .....	1
Makna Persahabatan Sebuah Tinjauan dari Perspektif Filsafat	
<i>J. Sudarminta</i> .....	25
Membangun Identitas Inklusif Krisis Identitas dalam Lensa Kajian Poskolonialisme	
<i>Robertus Wijanarko</i> .....	48
Menyoal Persahabatan sebagai Problem Relasionalitas: Sebuah Konstruksi atas Konsep Alteritas Emmanuel Levinas dan Pluralitas Hannah Arendt	
<i>Pius Pandor</i> .....	66
Persahabatan dalam Perspektif Neo-Thomisme Yoseph Pieper	
<i>Donatus Sermada</i> .....	95
Konsep Persahabatan dalam Pemikiran Thomas Aquinas	
<i>Valentinus Saeng</i> .....	112
Humanisme Bagi Sesama - Menyingkap Akar Kekerasan dalam Relasi Antarmanusia dan Etika Tanggungjawab Menurut Emmanuel Levinas	
<i>Editha Soebagio</i> .....	137

## PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF BIBLIS

Persahabatan antara Allah dan Manusia: Suatu Tinjauan Alkitabiah <i>Henricus Pidyarto Gunawan</i> .....	161
Abraham Sahabat Allah <i>Berthold Anton Pareira</i> .....	172
Sahabat-Sahabat Tuhan Yesus: Suatu Renungan Teologi Biblis <i>Berthold Anton Pareira</i> .....	183
Doa Batin: Doa Persahabatan dengan Yesus Menurut Santa Teresia Dari Yesus <i>Berthold Anton Pareira</i> .....	190
Redefinisi Arti Sahabat dalam Perspektif Kitab Ayub <i>Gregorius Tri Wardoyo</i> .....	200
Dinamika Persahabatan Barnabas dan Paulus <i>F.X. Didik Bagiyowinadi</i> .....	216

## PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF TEOLOGIS

Allah Tritunggal: Allah yang Bersahabat <i>Kristoforus Bala</i> .....	243
Jürgen Moltmann: Persahabatan Sebagai Antisipasi Kepenuhan Harapan <i>Antonius Denny Firmanto</i> .....	275
<i>Communicatio In Sacris</i> : Berbagi Kasanah Rohani <i>I Ketut Gegel</i> .....	294
Gereja sebagai Komunitas Persahabatan <i>Markus Situmorang</i> .....	334
Kolegialitas: Suatu Bentuk Berkelanjutan Imam <i>Edison R.L. Tinambunan</i> .....	351

## PEMIKIRAN DARI TEOLOGI PRAKTIS

Merayakan Persahabatan yang Memerdekakan <i>Robertus Pius Manik</i> .....	369
--	-----

*Homo Homini Amicus:*

Tanggungjawab Kultural Gereja dalam Zaman ini

*Raymundus Sudhiarsa* ..... 381

*Sollicitudo Omnium Ecclesiarum:*

Kepedulian dan Kerjasama Gerejawi untuk Tanah Misi dan di Tanah Misi

*A. Tjatur Raharso* ..... 408

Pengaruh Persahabatan Terhadap Kesejahteraan Hidup Manusia

*Kurniawan Dwi Madyo Utomo* ..... 434

Persahabatan Sejati dalam Islam

*Peter Bruno Sarbini* ..... 451

Misi dalam Kaitannya dengan Pemikiran Martin Buber/

*Frans Hardjosetiko* ..... 466

Biodata Kontributor ..... 471

# ***HOMO HOMINI AMICUS:*** **TANGGUNGJAWAB KULTURAL GEREJA** **DALAM ZAMAN INI**

---

*Raymundus I Made Sudhiarsa*

## **Abstract**

This article is to promote the values of friendship from the Christianity anthropology perspective in the frame of nation community as a shared-home. Very often, friendship is reduced exclusively on ‘*in-group*’ and enriched by primordial mentality (religion, culture, race, communities in the society). They who don’t agree with the values lived by the ‘*in-group*’ regarded as ‘the others’, even, treated as dangerous opponents. Firstly, to build a great cultured society, the concept of ‘friendship’ (Latin: *amicitia*; Greek: *philia*) should be re-defined. In the Christianity anthropology, friendship, as the highest form of relationship, has its source in the belief that man is created in ‘God’s image’ (Gen 1:26-28), who has the responsibility to manage the shared-world to live together in harmony. Secondly, the Catholic education institutions, from elementary to university, need to continually self-empowered with the spirituality of friendship which promotes more civilized humanity, ‘with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength’ (Mark 12:30)

**Keywords:** friendship spirituality, inter-culturalism, new civilization, altruistic love, nation community

---

## **Abstrak**

Artikel ini bermaksud memajukan nilai-nilai persahabatan dari perspektif antropologi kristiani dalam bingkai komunitas bangsa sebagai rumah-bersama. Banyak kali persahabatan itu direduksi secara eksklusif pada ‘*in group*’ dan disuburkan oleh mentalitas primordial (agama, budaya suku,



kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan). Mereka yang tidak sepaham dengan nilai-nilai yang dihayati ‘*in group*’ dipandang sebagai ‘yang lain’, bahkan diperlakukan sebagai lawan yang berbahaya. Untuk membangun masyarakat yang berperadaban luhur, pertama-tama konsep ‘persahabatan’ (Latin: *amicitia*; Yunani: *philia*) perlu dimaknai ulang. Dalam antropologi kristiani, persahabatan, sebagai bentuk relasi sosial tertinggi, memiliki sumbernya pada iman akan hakikat manusia yang diciptakan menurut ‘citra Allah’ (Kej 1:26-28), yang diberi tanggung jawab untuk menata dunia-bersama bagi hidup-bersama yang ramah. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan katolik, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, perlu terus memberdayakan diri dengan spiritualitas persahabatan yang memajukan kemanusiaan yang lebih beradab, ‘dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan’ (Mrk 12:30).

**Kata kunci:** spiritualitas persahabatan, interkulturalisme, peradaban baru, cinta altruistik, komunitas bangsa

---

## 1. Pengantar

Ketika negara-bangsa Indonesia diproklamasikan (1945), aura persahabatan antar-sesama anak negeri terasa sangat kental (bdk. Latif, 2014). Ada perasaan dan pikiran bersama yang terjalin dalam gelora persahabatan dan kerjasama yang subur. Saling mengulurkan tangan dan membuka hati merupakan kekuatan yang memberdayakan bagi sosialitas baru yang dicita-citakan, yakni Indonesia raya, yang bebas dari dominasi imperialisme kolonial asing dan yang merangkul semua anak negeri dalam peradaban baru yang lebih humanis dan lebih religius. Persahabatan itu melampaui batas-batas ras, suku, agama, dan kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Mereka semua adalah sahabat (Latin: *amicus*, *socius*; Yunani: *philos*) satu sama lain, yang rela-sedia membangun suatu kerekanaan (Latin: *amicitia*; Yunani: *philia*) baru, yakni suatu sosialitas yang lebih bermartabat dan lebih beradab.

Akan tetapi, visi kebersamaan yang ideal dalam ruang sosio-politis Republik Indonesia ini harus dibangun dengan susah payah. Bahkan, secara



historis, ia diperjuangkan dengan keringat dan darah. Ternyata, betapa sulit mempertahankan kesepakatan untuk membangun negeri ini menjadi rumah-bersama yang menjamin rasa aman bagi semua anggotanya. Lebih-lebih lagi, ketidaksepahaman antar kelompok-kelompok yang berseberangan seringkali di-*blow-up* dalam media sosial sedemikian rupa sehingga konflik-konflik sosial yang memprihatinkan bisa menjamur. Lebih memprihatinkan lagi, ketika ruang publik zaman ini didominasi oleh wacana-wacana sektarian yang memprovokasi kelompok-kelompok kepentingan, sehingga aura sosial masyarakat kita terasa semakin kelam. Kekuatan-kekuatan negatif secara arogan mengumbar roh anti-sosial dan secara bebas mendemonstrasikannya seperti tanpa beban. Ujaran-ujaran kebencian mengungkapkan kuasanya; dan orang-orang yang ada di baliknya mencibir dengan rasa muak, seperti kaum Kurawa *ngeledakin* Pandawa lima. *Homo homini monstrum* (manusia menjadi monster bagi sesamanya), seperti yang dikatakan oleh Victor Hugo (1802-1885).

Kondisi yang tidak sehat ini tentu berdampak negatif. Ia telah meracuni sekurang-kurangnya satu generasi anak bangsa dengan roh-roh anti-sosial dan anti-persahabatan. ‘Sahabat’ dan ‘persahabatan’ telah menjadi sesuatu yang sangat mahal. Fenomena ini telah menarik minat para akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengadakan penelitian. Banyak karya ilmiah telah ditulis mengenai fenomena sosial ini (bdk. Bamualim et al., 2002; Ningrum et al., 2018; Febriyani, 2018; Heller and Magid, 2019; United Nations, 2019)

Paper ini ingin *urun rembug* dalam diskusi mengenai pentingnya mempromosikan nilai-nilai persahabatan antar-sesama manusia. Bukan hanya karena persahabatan merupakan hakikat manusia sebagai makhluk yang membutuhkan teman (Aristoteles: *zoon politikon*), melainkan juga karena dorongan cinta altruistik untuk berbagi bersama dengan ‘yang lain’ dalam ‘sosialitas’ yang disebut Indonesia. Dalam masyarakat yang dipenuhi oleh wacana-wacana kebencian dan permusuhan, kebutuhan akan persahabatan yang sejati menjadi semakin mendesak. Sejalan dengan tema perayaan Emas STFT Widya Sasana (1971-2021) paper ini percaya bahwa membangun persahabatan sesungguhnya merupakan panggilan dasar setiap orang beriman. Untuk maksud itu, pertama-tama akan dikritisi secara singkat

konteks sosialitas atau masyarakat Indonesia dan kebijakan dalam tata kelolanya. Kedua, akan ditawarkan kemungkinan untuk beranjak dari multikulturalisme pasif ke interkulturalisme yang lebih aktif. Pada bagian ketiga akan diulas dinamika budaya dan partisipasi Gereja dalam konservasi dan promosi budaya. Lalu, pada bagian keempat akan dikedepankan agenda Gereja dan keterlibatan aktifnya dalam masyarakat bangsa.

## **2. Menuju Multikulturalisme yang Subur**

Keragaman dalam masyarakat di kepulauan Nusantara ini merupakan realitas terberi. Ini suatu kekayaan yang sudah seringkali disyukuri dengan berbagai cara oleh anak-anak bangsa, entah keindahan alam, keragaman budaya etnis, religiositas-religiositas lokal, entah agama-agama dunia yang telah berabad-abad berkembang di sini, dan lain sebagainya. Kekayaan ini juga dikagumi oleh para petualang dan kaum pelancong yang datang ke negeri ini, di samping menjadi objek penelitian yang sangat subur bagi berbagai disiplin ilmu.

### **2.1 *Tanggung jawab iman***

Putra-putri Gereja, sebagai anggota-anggota integral dari masyarakat majemuk ini, melihat panggilan mereka sebagai partisipasi aktif untuk memelihara, mengelola, dan memajukan hidup bersama, yakni merayakan ‘persatuan dalam keragaman’ di negeri ini. Panggilan partisipatif ini diberdayakan oleh iman kristiani akan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia untuk mengelola lingkungan sosial dan lingkungan alamnya (bdk. Kej. 1:26-28) ‘dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan’ (bdk. Mrk 12:30; Ul 6:5). Mengelola hidup bersama yang harmonis dan dinamis seperti ini memiliki bobot yang sama dengan mencintai Allah, Sang Pemberi hidup. Inilah nilai etis teologis dari iman kristiani yang menuntut keterlibatan aktif itu.

Lembaga pendidikan ini –Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang– juga terus mengupayakan kerjasama yang baik dengan banyak lapisan masyarakat guna memajukan kebaikan bersama. Tema Pesta

Emas STFT ini (1971-2021) mengingatkan kita akan tema-tema keramahtamahan dan persahabatan yang ada dalam tradisi kultural-religius Yahudi-Kristiani. Salah satu narasi yang menarik untuk dirujuk adalah kisah Bapa Abraham yang menjamu tiga tamu di kemahnya (Kej 18). Karakter khas Bapa Bangsa ini, yakni persahabatan dan ketulusan dalam menjamu ‘orang-orang asing’, menjadi salah satu inspirasi untuk membangun persahabatan yang bebas dari rasa curiga dan jauh dari kontaminasi persepsi-persepsi negatif. Sebagian dari kata-kata Abraham dalam narasi alkitabiah itu kita kutip berikut ini:

Tuan ku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampau hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini; biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali; kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini (Kej 18:3-5).

Ayat-ayat suci ini pasti sudah seringkali dikutip dan dijadikan bahan renungan oleh jemaat-jemaat kristiani di tanah air, baik secara pribadi maupun bersama. Pengalaman religius-kultural Bapa Abraham ini memang sangat inspiratif untuk terus memajukan persahabatan yang sejati. Karakter Bapa Abraham yang dilukiskan di atas juga mengungkapkan kedalaman hidup religiusnya, dalam hal ini, terhadap orang asing. Dengan kata-kata ‘janganlah lampau hambamu ini’, misalnya, Abraham menunjukkan kepribadiannya yang humanis, yakni sukacita menerima tamu, terbuka kepada ‘yang lain’ dan “Sang Lain”. Bahkan, tidak jarang pula ayat-ayat ini ditafsirkan dalam kerangka konstruksi teologi trinitaris yang sangat inspiratif.

Keterbukaan Bapa Abraham untuk menjamu ketiga tamunya dalam narasi Kitab Kejadian tersebut diangkat di sini untuk menyalakan kembali spiritualitas persahabatan yang penting bagi konstruksi peradaban masyarakat di bumi Nusantara ini. Alasan ini dianggap penting dan semakin mendesak, karena pada kenyataannya kemajemukan sosio-kultural-religius di negeri ini merupakan sebab munculnya berbagai konflik dari generasi ke generasi. Disinyalir pula bahwa keragaman ini tidak dengan sendirinya diimbangi oleh penerimaan positif antar kelompok-kelompok yang berbeda. Sebaliknya, ia (realitas ini) malahan menjadi ‘kontraproduktif bagi penciptaan tatanan

kehidupan berbangsa yang damai, harmonis dan toleran' (lih. Mahfud, 2008:79).

Persahabatan yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendiri bangsa-negara, dewasa ini telah dicemari oleh menjamurnya pikiran-pikiran sektarian, primordial, dan eksklusivisme religius-politis, dan diperparah oleh penyebaran ujaran-ujaran kebencian dengan mudah lewat media sosial, seperti disinggung di depan. Fenomen ini agaknya mencerminkan peradaban dan kualitas kemanusiaan kita yang tidak menggembirakan. Salah satu hasil studi mengenai tema ini kita kutip berikut ini.

[...] bentuk ujaran kebencian yang ditemukan antara lain bentuk penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang tergolong menjadi empat topik yaitu tentang masalah politik, sosial, ekonomi dan agama. Adapun jenis tindak tutur ilokusi yang ditemukan antara lain bentuk tindak tutur ilokusi asertif 32,63%, direktif 20,63%, komisif 9,26%, ekspresif 35,9%, dan deklaratif 1,58% dengan total keseluruhan 882 data tuturan dari 20 konteks tuturan. Kesimpulan pertama, pada konteks tuturan paling banyak ditemukan bentuk ujaran kebencian penistaan agama dan pada kolom komentar paling banyak ditemukan bentuk penghinaan bersifat mencela. Kedua, jenis Tindak Tutur Ilokusi (TTI) paling banyak ditemukan pada tuturan netizen di kolom komentar adalah TTI Ekspresif kategori mengkritik. (Ningrum et al., 2018:241).

## 2.2 Masyarakat multikultural yang lebih dinamis

Masyarakat majemuk (*plural society*) Indonesia perlu dikonstruksi ulang dan dikelola lebih baik menurut gagasan masyarakat multikultural (*multicultural society*). Demikian pendapat antropolog Parsudi Suparlan (2000). Alasannya, konsep 'masyarakat majemuk' (*plural society*) merujuk pada 'sebuah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok, yang berbaur tetapi tidak menjadi satu' (Suparlan, 2000:1). Masing-masing kelompok yang berbeda itu, karena latar belakang 'agama, kebudayaan, dan bahasa, serta cita-cita dan cara-cara hidup mereka masing-masing' (ibid.), hidup berdampingan namun tanpa relasi yang hangat.

Dalam kondisi masyarakat majemuk yang pasif tanpa kehangatan

relasi yang adil dan beradab itu, dengan mudah bisa terjadi ketegangan, kerusuhan, dan kekerasan berdarah-darah. Pemicunya tentu saja perbedaan-perbedaan primordial itu, seperti latar belakang etnis, asal-usul daerah, keyakinan keagamaan, dan berbagai kepentingan yang saling berseberangan. Bahkan, Suparlan (2000; 2014) pernah mengingatkan pula akan adanya bahaya yang nyata, yakni potensi disintegrasi yang berasal dari sejumlah provinsi untuk merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal agama, Ahmad Syafii Maarif (2019) melakukan kritik diri atas kegagalan internalisasi nilai-nilai luhur agama. Kita kutip bagian berikut ini:

Di negeri dengan penduduk Muslim terbesar dunia ini, para pemeluk agama telah gagal melakukan internalisasi nilai-nilai agamanya. Agama yang seharusnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan, justru kini menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dan legitimasi kepentingan kelompok. Bahkan, agama ditengarai sering kali memberi andil yang cukup besar terhadap radikalisme. Berbagai kelompok menunjuk agama sebagai penyulut konflik-konflik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kalau kita lihat lebih saksana, bukan nilai-nilai Islamnya yang lumpuh dalam menawarkan solusi, melainkan otak dan hati penganutnya yang telah diracuni kepentingan duniawi yang membutuhkan (Maarif, 2019:6-7).

Memang benar bahwa pluralitas Indonesia ini sudah dikelola menurut semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ (beragam bersatu, bersatu dalam keragaman), namun hanya dalam tataran formal saja. Sementara itu, dalam tataran yang lebih dalam –Maarif menyebutkan: otak dan hati penganut agama– tidak ada internalisasi nilai-nilai luhur nan mulia itu. Karena itu, tetap perlu diwaspadai bahwa hidup berdampingan dengan toleransi pasif dan tanpa interaksi aktif satu sama lain itu bisa hancur berantakan menurut ciri masing-masing kelompok. Rendahnya kualitas rasa kebersamaan antar satuan-satuan sosial dalam masyarakat dan kentalnya prasangka-prasangka dan kecurigaan terhadap kelompok lain merupakan sebab-sebab pokok terjadinya berbagai kekerasan dari waktu ke waktu di Indonesia –seperti juga di banyak belahan dunia lain, misalnya, bekas Yugoslavia pada dasawarsa terakhir abad ke-XX yang lalu. Begitulah pengalaman nyata

bangsa ini dalam perjalanan sejarahnya sejak proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 (bdk. Adian, 2011).

Sedangkan kebijakan Otonomi Daerah terbukti semakin mengentalkan sikap antagonis *in group-out group* yang melahirkan berbagai kekerasan antar kelompok, baik yang bermuatan etnis maupun agama (bdk. Mahfud, 2008:131-132). Singkatnya, realitas sosial majemuk, yang secara teoretis dikelola menurut kebijakan multikultural, namun dalam prakteknya, yang terjadi adalah monokulturalisme. Itulah yang terjadi selama Orde Baru (1965-1998); bahkan, agaknya ini masih berlanjut pada era reformasi dewasa ini. Mengomentari kenyataan sosial ini, Suparlan menulis:

Primordialisme kesukubangsaan dan keagamaan justru berkembang. Feodalisme muncul dalam bentuk baru yang diselimuti oleh primordialisme kesukubangsaan dan keagamaan Islam. Demikian juga halnya dengan tatanan kehidupan paternalistik yang tetap bertahan (2001:5).

Guna mengatasi kekurangan ini, para ilmuwan sosial menganjurkan supaya tata kelola masyarakat majemuk yang telah diterapkan sejauh ini diganti dengan kebijakan multikulturalisme (lih. Suparlan, 2014). Berbeda dengan pengelolaan masyarakat majemuk, kebijakan masyarakat multikultural adalah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap kesederajatan perbedaan budaya dan memajukan kerjasama terpadu untuk mendukung ‘proses-proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komunitas atau masyarakat setempat’ (ibid.). Masyarakat multikultural itu bebas dari dikotomi-dikotomi antagonis mayoritas-minoritas, pribumi-pendatang, orang dalam-orang luar, kami-kamu, kita-mereka, dan sebagainya.

### **2.3 Budaya etnis, budaya daerah, dan budaya nasional**

Di samping agama, salah satu unsur kemajemukan lain yang menonjol dalam masyarakat kita adalah keragaman budaya. Di kepulauan Nusantara ini ada berbagai budaya yang sangat beragam, utamanya budaya-budaya etnis (sukubangsa). Kesatuan kesukubangsaan ini memang tidak sama sebangun dengan pembagian provinsi secara politis. Juga tidak ada

kesesuaian pemahaman mengenai ‘budaya kesukubangsaan’ (etnis) dengan ‘kebudayaan daerah’ (provinsi). Dalam kebijakan politik pemerintah, yang dianggap ada adalah ‘kebudayaan daerah’ dan bukan ‘kebudayaan kesukubangsaan’. Antropolog Parsudi Suparlan (2000) menyesalkan adanya pengaburan atau peniadaan ‘budaya sukubangsa’ dan digantikan dengan ‘budaya daerah’. Kita kutip sebagian penegasannya:

Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa dianggap tidak ada. Yang ada adalah kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah adalah sama dengan kebudayaan yang ada dalam wilayah propinsi. Padahal, wilayah sebuah propinsi adalah produk dari sistem nasional dan dibuat untuk kepentingan administrasi sistem nasional; dan bukan produk sistem sukubangsa (Suparlan, 2000:4-5).

Kalau mau memajukan negara-bangsa Indonesia lewat kebijakan politis dengan ideologi multikulturalisme, kiranya kekeliruan yang digambarkan tadi harus ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya, semua kelompok etnis dan keturunannya yang ada di wilayah politis Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan segala kekhususan dan kekayaan kulturalnya, diperlakukan sama. Begitu pula kebijakan otonomi daerah – yang dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan legal– perlu dikoreksi secara mendasar, khususnya dalam memperlakukan secara adil kelompok-kelompok minoritas yang ada dan menghargai hak-hak dan kewajiban mereka (Suparlan, 2014).

Intinya, kebijakan politis multikultural ini menjamin hidup berdampingan secara damai, semua kesatuan kultural yang ada dalam masyarakat. Multikulturalisme, sebagai suatu kebijakan politis dan ideologi, biasanya dipahami sebagai pendekatan inklusif, di mana keragaman dalam masyarakat menghargai dan menghormati sebagaimana adanya. Setiap unsur masyarakat dikondisikan untuk terintegrasi dengan seluruh masyarakat dan setiap warga dilibatkan dalam kerangka hidup bersama (bdk. Parekh, 2000:2-6; Kymlicka, 1998:10-11). Dalam konteks Indonesia, ada perasaan dan pikiran bersama. Para pendiri negeri ini sudah dengan susah payah dan penuh harapan mengupayakan adanya kesatuan dan kebersamaan dalam rasa, pikiran, dan perbuatan. Pada kenyataannya, konstruksi kesadaran kolektif ini tidak pernah selesai. Sebaliknya, kesadaran kolektif ini perlu selalu dikonstruksi ulang



dalam skala nasional dan perlu dijadikan agenda kerja dan edukasi yang berkelanjutan, dari generasi ke generasi, di seluruh negeri – termasuk juga kaum diaspora Indonesia di manca negara.

Keinginan tulus untuk mengimplementasikan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini menghadapi tantangan berat dari rakyat sendiri. Dalam praktek, misalnya, kita menyaksikan adanya segregasi sosial yang semakin nyata dan jelas, bahkan semakin tajam. Menjamurnya sekolah-sekolah berwajah monokultural, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, di seluruh penjuru tanah air. Anak-anak terlatih hidup dalam keseragaman, sehingga polapikir, polarasa, dan perilaku mereka juga bersifat tunggal dan seragam. Dampaknya jelas, yakni kebenaran tidak ada di luar kelompok sosialnya. Sekurang-kurangnya melihat ‘yang lain’ dengan curiga dan penuh prasangka dan merasa tidak nyaman akan kehadiran ‘yang lain’ itu.

Ghettoisme yang dibumbui oleh politik identitas sudah tentu membawa dampak segregasi sosial yang semakin parah dengan dikotomi antagonistiknya. Minimnya interaksi yang mendalam antar kelompok sosio-kultural-religius yang berbeda dan dipertegas lagi oleh wacana-wacana perbedaan antar kelompok ini oleh petualang-petualang politik dan pengkhotbah-pengkhotbah tertentu semakin mempertajam sentimen antar kelompok yang berbeda. Ketidaksenangan dan prasangka, yang ditambah lagi dengan berbagai kecurigaan yang tidak kritis, dengan sendirinya berpotensi mengentalkan sikap bermusuhan terhadap ‘yang lain’ yang sewaktu-waktu bisa meledak.

## **2.4 Asimilasi pada *mainstream***

Perbedaan kultural alami yang diatur menurut tata kelola politik dewasa ini memberikan kesan bahwa setiap provinsi berkarakter budaya tunggal (monokultur). Realitas sosio-kulturalnya tentu saja tidaklah demikian. Dalam satu provinsi ada aneka ragam kelompok budaya. Sementara itu, kelompok mayoritas mengelola kebijakan publik dalam provinsinya dengan mengutamakan kepentingan kelompoknya (etnis maupun agama). Secara hegemonik kelompok mayoritas ini memandang kelompok minoritas sebagai

‘tamu’ yang tidak dikehendaki kehadirannya. Meskipun kehadiran mereka ditoleransi, namun secara pasif dan penuh purba sangka. Dan lagi, mentalitas dikotomis seperti yang disebutkan di atas masih menjadi warna sosial-politis yang kuat di negeri ini. Penerapan konsep ‘pluralisme budaya’ semacam ini tentu saja mencederai cita-cita membangun masyarakat yang adil dan beradab, karena selalu ada kelompok dominan yang hegemonik (bdk. Suparlan, 2001:5; Liliweri, 2018:173-174). Kelompok-kelompok lain barangkali bisa ditoleransi sampai batas-batas tertentu bila mereka melakukan adaptasi atau asimilasi pada arus-utama.

Keberhasilan dalam menata masyarakat majemuk secara berkeadilan mengandaikan adanya satu syarat mendasar, yakni dialog antar budaya, di mana masing-masing entitas kultural memiliki daya tawar yang sama. Alasannya, dialog antar budaya bisa membuka peluang untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain. Ini pada gilirannya akan bisa menjadi landasan untuk penyuburan pola pikir dan pola rasa bersama dengan perilaku humanis yang pro-eksistensi. Langkah ini bisa lebih menjamin dijauhkannya segala prasangka dan salah paham yang merugikan, khususnya terhadap mereka yang dianggap ‘*out group*’. Kondisi semacam ini merupakan langkah maju, karena beranjak dari kondisi ‘pluralitas budaya’ ke masyarakat yang menghayati ‘multikulturalisme budaya’. Tentang yang disebut terakhir ini Alo Liliweri memberikan penjelasan demikian: “Multikulturalisme tidak memiliki kebutuhan budaya dominan. Jika budaya dominan melemah, masyarakat dapat dengan mudah beralih dari pluralism budaya ke dalam multikulturalisme tanpa langkah-langkah yang disengaja diambil dari masyarakat tersebut” (2018:174).

Dengan kata lain, peradaban yang humanis dan yang memajukan kebaikan bersama ini bisa lahir dari kondisi masyarakat yang ‘saling-menyambut’ dan dari ketulusan anggota-anggotanya untuk saling menaruh minat terhadap satu sama lain (bdk. Nur Syam, 2009:77). Kesetaraan peran dan derajat semua kelompok sosial dirayakan dengan tulus dan perbedaan-perbedaan dihargai secara seimbang.

Ini mengingatkan kita akan ‘mentalitas bahari’ yang dihayati oleh nenek moyang bangsa kita. Sebagai negeri dengan hamparan pulau-pulau yang

membentang di katulistiwa ini, nenek moyang kita sudah terbiasa dengan keterbukaan terhadap ‘yang lain’. Mereka menerima dan menghargai perbedaan dan gemar belajar dari capaian-capaian para tamu dan tetangga yang sehari-hari dijumpai dan diajak bernegosiasi. Masyarakat kita dewasa ini masih bisa belajar banyak dari nenek moyang yang mempraktekkan mentalitas bahari yang dinamis itu (bdk. Dahana, 2019).

### **3. Dari Multikulturalisme ke Interkulturalisme**

Multikulturalisme sebagai kebijakan publik kelihatannya telah memfasilitasi hidup toleran dan berdampingan tanpa saling mengganggu antar kelompok-kelompok sosio-kultural-religius yang berlainan. Hanya saja, seperti disinggung di atas, kondisi sosio-politis semacam ini telah dimanfaatkan kelompok-kelompok dominan yang mempunyai akses ke pemerintahan untuk menguntungkan kelompoknya. Tata regulasi dipengaruhi sedemikian rupa sehingga memperbesar manfaat bagi kelompoknya sendiri. Ketika kebijakan Otonomi Daerah atau Desentralisasi dimajukan secara legal setelah jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998 (bdk. Vickers, 2011:339-344), bermunculan pula Peraturan-Peraturan Daerah yang, sayangnya, disusun menurut warna keinginan kelompok dominan. Karena mereka menguasai posisi-posisi yang memutuskan kebijakan umum, segala sesuatu diatur dengan mengutamakan kepentingan mayoritas.

#### **3.1 Kelemahan multikulturalisme**

Bagi Suparlan (2001:9), masyarakat majemuk ini, termasuk Indonesia, berpotensi ‘otoriter dan despotik, karena corak struktur sosial kelompok-kelompok sukubangsanya yang beranekaragam dari feodalistis dan paternalistis sampai dengan yang etnosentris dan tribalistik.’ Dengan kata lain, segregasi sosial tetaplah sulit dikelola secara politis.

Demikian juga ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok minoritas masih terus menjadi masalah dalam hidup sehari-hari di berbagai tempat di negeri ini. Kekerasan kelompok mayoritas dan arus-utama terhadap kelompok lain, yang dianggap mengancam, tetap menjadi keprihatinan bersama (bdk. Nur Syam, 2009:131-146). Mayoritas menjadi kelompok-

kelompok penekan dengan isu-isu sensitif, dengan nuansa agama maupun etnis atau keturunan. Sampai sekarang negara-bangsa Indonesia tetap sangat rentan akan isu-isu sensitif ini. Apalagi pemaksaan kehendak-kehendak kelompok mayoritas seringkali terkesan ditoleransi oleh pemerintah. Kalau sinyalemen ini benar, tentu tidaklah salah bahwa banyaknya tindakan intoleran dari kelompok-kelompok penekan ini juga ditoleransi. Inilah kondisi paling buruk yang dialami oleh negara-bangsa yang multikultural.

Dibandingkan dengan banyak negara lain dengan kekerasan berdarah-darah yang berkepanjangan, di negeri ini pada umumnya boleh dikatakan bahwa hidup berdampingan antar berbagai kelompok yang berbeda masih terpelihara. Hanya saja, ini merupakan suatu toleransi pasif, karena tidak ada interaksi yang lebih mendalam daripada sekedar menjaga dan memelihara garis demarkasi, agar tidak terjadi saling mengganggu satu sama lain.

Hidup berdampingan dengan toleransi pasif ini hanya menampilkan masyarakat majemuk sebagai mosaik yang sudah selesai, yang sudah jadi dan hanya tinggal dilestarikan saja. Masyarakat majemuk seperti ini bagaikan sebuah pasar, yakni arena perjumpaan antar-warga masyarakat secara superfisial. Karena itu, tata kelola hidup bersama dalam masyarakat majemuk seperti ini perlu dikoreksi. Segregasi dan hidup berdampingan tanpa saling mengganggu atau toleransi pasif semacam ini mestinya diatasi dengan penciptaan situasi yang memungkinkan adanya interaksi yang saling membangun.

Lewat Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pernah mewacanakan ‘pendidikan multikultural’. Meskipun gagasan dasarnya kedengaran sangat baik, yakni mewujudkan kesetaraan budaya, hanya saja dampak positifnya mungkin masih membutuhkan banyak waktu. Lewat Pendidikan multikultural, kepada para peserta didik diperkenalkan realitas keragaman sosio-kultural, dipromosikan perdamaian dan rasa kebersamaan, dan dimajukan sikap toleran dan kesantunan kepada yang lain. Kita lihat, misalnya, pasal 4 nomor 1 yang menyatakan ini: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Atau, pasal 5 nomor 1 memberi pernyataan yang tegas mengenai pentingnya

perlakukan yang tidak diskriminatif: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Ditegaskan oleh Undang-Undang bahwa Pendidikan Nasional harus menjamin setiap peserta didik dari latar belakang ras, suku bangsa, kelompok sosial yang berbeda mendapat pendidikan dengan kualitas tinggi. Artinya, sekolah-sekolah perlu dikondisikan sedemikian rupa sehingga menjadi arena yang secara kultural bersahabat untuk setiap peserta didik. Pernyataan ini bisa diterjemahkan sebagai penegasan akan pentingnya berbagai perubahan di sekolah-sekolah, baik kurikulumnya, materi pembelajarannya, pola belajar-mengajar, sikap-sikap para guru dan penyelenggara administrasi sekolah untuk terciptanya kondisi pendidikan multikultural. Bisa ditengarai bahwa sasaran yang hendak dicapai adalah generasi muda yang memiliki kompetensi-kompetensi multikultural yang memadai bagi masyarakat Indonesia yang multikultural ini.

Mestinya Kurikulum 2013(revisi 2019) yang sudah diberlakukan sebagai kebijakan pendidikan nasional bisa menerjemahkan nilai-nilai multikultural itu. Pada tataran ideal, pendidikan sejatinya merupakan arena bagi peletakan fundamen yang kuat bagi berkembangnya kehidupan multikultural (bdk. Mahfud, 2008: 79). Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, entah negeri entah swasta, mestinya menciptakan kebudayaan sekolah yang mendukung pendidikan multikultural dengan meninggalkan pengalaman pendidikan monokultural yang potensial mengembangkan arogansi, insensitivitas, dan sikap rasis para peserta didik. Seorang pejuang politik multikulturalisme, Bhikhu Parekh melukiskan pentingnya pendidikan ini karena ia menjadi medan yang “*exposes pupils to different conceptions of a good life, systems of belief and modes of conceptualizing familiar experiences, gets them to enter into the spirit of other cultures*” (2006:227). Persahabatan yang sejati bukanlah konsep, melainkan praktek di mana seni hidup bersama dalam keragaman dirayakan dengan sukacita.

### **3.2. Mempertimbangkan interkulturalisme**

Lebih daripada itu, demi kepentingan kehidupan bersama dan

pembangunan negara-bangsa Indonesia, secara yuridis semua kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara sama. Tiap-tiap kelompok sosio-religius juga bertanggung jawab untuk menyumbangkan modalnya untuk membangun masyarakatnya. Semua elemen masyarakat terintegrasi sedemikian rupa sehingga semuanya memberi kontribusi untuk konstruksi sosio-kultural-religius dan kesatuan negara-bangsa ini. Singkatnya, kebijakan seperti ini, di mana semua elemen masyarakat terintegrasi dalam kesatuan utuh masyarakat, disebut interkultural. Interkulturalisme, yang memberi ruang bagi semua unsur yang terintegrasi ke dalam susunan masyarakat majemuk, pada intinya mengatasi kecenderungan yang menuntut kelompok-kelompok minoritas dan mereka yang dianggap ‘yang lain’ untuk mengasimilasikan diri ke dalam budaya dominan. Tidak ada proses asimilasi minoritas ke dalam arus-utama atau kebudayaan yang dominan.

Interkulturalisme bisa menjadi tema sosio-kultural baru yang inklusif dan aktif. Inklusif, karena mengatasi segregasi sosial berdasarkan dikotomi mayoritas-minoritas, kami-kamu, kita-mereka. Dampaknya, fragmentasi eksklusif dan segregasi sosial dengan mentalitas ghetto semakin ditiadakan. Aktif, karena interkulturalitas memajukan adanya interaksi antar-warga dan antar elemen-elemen masyarakat dan budaya-budaya yang ada. Interkulturalitas mengatasi penerimaan dan sikap hormat yang pasif antar kelompok budaya. Interkulturalitas mengondisikan masyarakat untuk mengganti sikap curiga dengan minat untuk saling berjumpa dan saling belajar. Interkulturalisme memajukan budaya komunal dan identitas nasional yang tidak didominasi oleh unsur-unsur budaya kelompok. Unsur-unsur budaya nasional dan identitas nasional, entah bahasa, cara berpakaian, musik dan tari-tarian, pendidikan, etika, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya, tidak didominasi oleh unsur-unsur kelompok sosio-kultural-religius tertentu.

Mentalitas interkultural dicirikan oleh sikap terbuka kepada, rasa ingin tahu akan, berminat terhadap, dan berempati kepada orang-orang dari budaya lain. Kondisi-kondisi sosio-psikologis interkultural ini yang difasilitasi secara baik akan memantapkan kesadaran akan ‘yang lain’ (*the others and otherness*) dan mendorong keterlibatan atau interaksi yang lebih intens dengan ‘*the others*’. Selanjutnya, interaksi yang bersinambung ini –dan yang berlangsung setiap saat– akan memungkinkan terjadinya langkah-langkah

bersama atau gotong-royong (bdk. Adian) untuk mewujudkan tujuan bersama.

Pada saat yang sama, interkulturalitas yang subur akan menjamin pula adanya evaluasi terhadap pola-pola pikir, pengertian, rasa, dan laku diri sendiri. Dari sini bisa diprediksi bahwa kelak akan semakin berkembanglah pemahaman yang lebih baik akan diri sendiri. Kebijakan interkultural bisa menjadi mediasi pertemuan antar-warga dari latar belakang budaya. Ini pula akan mengondisikan masyarakat untuk saling mengenal dan terbuka kepada perspektif masing-masing. Artinya, interkulturalitas memfasilitasi tiap-tiap orang untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi interkulturalnya, baik pada ranah nalar (*cognitive*), polarasa (*affective*), maupun perilaku (*behavioural*).

Aspek nalar atau pengetahuan mencakup kecakapan, seperti pengetahuan akan kelompok-kelompok budaya lain, adat kebiasaan, hasil-hasil budaya, dan sebagainya. Aspek polarasa mencakup, misalnya, kepekaan budaya, keingintahuan, keterbukaan, hormat terhadap yang lain, empati, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek perilaku bisa menyangkut ketrampilan bersosialisasi, seni mendalami untuk menemukan hal-hal baru dari budaya lain. Kebijakan intercultural yang memungkinkan dikembangkannya kompetensi-kompetensi interkultural warganya akan memajukan masyarakat dengan segala modal yang dimiliki.

#### **4. Gereja: Konservasi dan Promosi Budaya**

Hakikat budaya manusia itu adalah dinamis. Selalu berkembang menurut berbagai kondisi, baik subjek-subjek pendukungnya (baik individu maupun kelompok, *anthropos* maupun *ethnos*), lingkungan ruang atau ‘rumah-bersama’ atau *shared-world* (Greek: *oikos*, lingkungan sosial maupun alam/fisik), capaian teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan, di samping faktor waktu (Latin: *tempus*, Greek: *chronos*). Dinamika budaya dan masyarakat itu biasanya diawali dengan imitasi dan adopsi capai-capaian budaya lain yang menjadi mitra dialognya.



#### 4.1 *Imitasi dan adopsi*

Budaya sebagai konstruksi sosial merupakan siasat manusia dalam mengelola hidupnya. Itulah suatu cara hidup bersama dalam menghadapi hari esok. Karena setiap kelompok sosio-kultural-religius menghasilkan cara-cara khusus dalam menyuasati hidupnya, orang pun bisa berbicara tentang pluralitas budaya, seperti yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Siasat kehidupan itu bisa terungkap dalam berbagai ekspresi, seperti “cara menjalankan pekerjaan dan mengungkapkan diri, menghayati agama dan membina tata susila, menetapkan undang-undang dan membentuk lembaga-lembaga hukum, memajukan ilmu pengetahuan serta kesenian, dan mengelola keindahan” (lih. *Gaudium et Spes* [GS], 53). Dengan logika yang sama, keragaman ekspresi kultural ini tidak bisa menafikan eksistensi budaya populer yang melanda masyarakat zaman ini (lih. Srinati, 2009:36-51; Storey, 2003:10-26).

Setiap agama universal yang datang ke Kepulauan Nusantara ini telah memungkinkan budaya-budaya yang sudah ada sebelumnya mendapatkan spirit baru, *anima transformative*. Banyak nilai lokal yang dianggap absolut ditafsirkan ulang dalam perjumpaan itu. Yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman ditinggalkan atau dihapuskan, sedangkan nilai-nilai lainnya diadopsi. Kebudayaan, dengan demikian, merupakan entitas yang selalu dikonstruksi ulang guna menjamin kelangsungan hidup setiap warga dan semua anggota masyarakat.

Proses akulturasi semacam ini merupakan fakta yang jelas dan teramati. Dengan itulah masyarakat berubah dan berkembang. Dengan begitu pula manusia mengubah dan/atau merekonstruksi budaya-budayanya, entah dengan menghidupkan kembali tradisi leluhur, entah dengan menciptakan kembali atau meramunya lewat proses penyerbukan silang interkultural, entah dengan menemukan budaya alternatif sebagai pilihan baru (bdk. Sutrisnaatmaka, 2006:99; Rukmana dan Lembong, eds., 2015).

#### 4.2 *Peran Gereja*

Gereja, baik sebagai lembaga maupun sebagai komunitas beriman (individual maupun komunal) juga mengambil bagian dalam dinamika budaya

dan peradaban yang meluhurkan martabat manusia ini. Ada banyak putra-putra bangsa yang memajukan negara-bangsa Indonesia ini atas dasar iman Katolik, baik awam maupun klerus. Bahkan sudah sejak beberapa dasawarsa sebelum Proklamasi Kemerdekaan (1945) dan juga sesudahnya, putra-putra terbaik Gereja Katolik turut serta memperjuangkan bangunan masyarakat yang menghargai tiap-tiap orang secara hormat dan kemanusiaan sebagai nilai yang luhur. Sebagai misal, kita kutip tulisan G. Moejanto (1993:209-210) berikut ini:

[...] setahun setelah brosur keluar, jadi dalam tahun 1923, sekitar 40 orang pemuka jemaat Katolik Indonesia, berumur antara 20 dan 30 tahun, berkumpul di salah satu ruang Sekolah Dasar Katolik di Kemendaman, Yogyakarta. Di situlah mereka sepakat untuk mendirikan Perkempalan Politik Katolik Djawi (Perkumpulan Politik Katolik Jawa, PPKD). Pengurusnya adalah Jacob Soejadi, I.J. Kasimo dan F. Haryadi. Mereka akan menjadi tokoh Katolik yang terkenal. Soejadi pernah aktif dalam Volksraad, Kasimo juga aktif dalam Volksraad, menjadi Menteri persediaan makanan dalam masa revolusi, dan Menteri Perekonomian dalam Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi). Haryadi pernah menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Natsir (Masyumi).

Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, nama-nama para misionaris dari berbagai Ordo dan Tarekat religius telah menghiasi sejarah peradaban dan kebudayaan-kebudayaan etnis di negeri ini, khususnya kontribusi mereka dalam konservasi dan promosi budaya-budaya lokal. Kita sebutkan beberapa tokoh yang sudah meninggal dunia, seperti Pastor Frans van Lith, SJ (1863-1926) dan Pastor P.J. *Zoetmulder*, SJ (1906-1995) dalam budaya Jawa; Pastor *Paul Arndt*, SVD (1886-1962) dan Pastor *Jilis A.J. Verheijen*, SVD (1908-1997) di Nusa Tenggara Timur; Pastor Johannes Boelaars, MSC (1915- 2004) di Papua; Uskup *Michael C.C. Coomans*, MSF (1933-1992) di Kalimantan; dan Pastor Johannes *Kersten*, SVD (1907-1990) dan Pastor Norbert Shadeg, SVD (1921-2006) dalam budaya Bali.

Daftar tokoh-tokoh besar dari Gereja Katolik untuk budaya-budaya etnis di Kepulauan Nusantara ini masih bisa diperpanjang lagi menjadi suatu litani yang mengagumkan (bdk. Kristiyanto, 2015). Namun, dengan menyebut nama-nama ini sebagai contoh di sini, hanya ingin digarisbawahi bagaimana Gereja telah terlibat dalam membangun masyarakat luas dan juga

(khususnya) budaya-budaya etnis. Keterlibatan mereka dalam konservasi dan promosi berbagai budaya suku bangsa di Nusantara menggemakan ajakan Konsili Vatikan II untuk menyelaraskan relasi budaya dengan pendidikan Kristiani. Kita kutip sebagian pedoman dan anjuran Konsili:

Dengan caranya sendiri pula, kesusastraan dan kesenian cukup penting bagi kehidupan Gereja. Sebab keduanya berusaha menyelami kodrat khas manusia, masalah-persoalannya maupun pengalamannya dalam upaya-upayanya mengenal serta menyempurnakan dirinya maupun dunia. Keduanya mencoba menyingkapkan situasi manusia dalam sejarah dan di seluruh dunia, menggambarkan duka-derita maupun kegembiraannya, kebutuhan-kebutuhan maupun daya kekuatannya, serta membayangkan kondisi hidup manusia yang lebih baik. Begitulah keduanya mampu mengangkat hidup manusia, yang terungkap dalam pelbagai corak-ragamnya sesuai dengan zaman dan daerah kediannya (GS, 62).

Inspirasi dasar keterlibatan Gereja dalam budaya bersumber pada misteri inkarnasi (bdk. Sudhiarsa, 2006:150), yaitu Sang Sabda yang menjadi manusia, yang datang bukan untuk menghapus budaya dan adat kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, melainkan untuk menyempurnakan yang sudah baik dan membersihkannya dari nilai-nilai dan praktek-praktek yang merendahkan martabat manusia. Konsili Vatikan II, misalnya dalam *Nostra Aetate* (NA), Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama bukan-Kristiani, menegaskan bagaimana Gereja membina relasi saling menghargai dengan komunitas-komunitas religius yang lain. Kita kutip sebagian dari isi pernyataan para Bapa Konsili itu:

Gereja Katolik tidak menolak apapun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang (NA, 2).

Teologi inkarnasi telah menginspirasi banyak putra-putri Gereja untuk terlibat dalam budaya-budaya lokal dengan segala persoalannya dan memajukan budaya-budaya tersebut dengan masyarakat pendukungnya. Pengalaman Gereja untuk konservasi dan promosi budaya-budaya lokal di

Kepulauan Nusantara ini sudah banyak dicatat dalam sejarah, seperti disinggung di atas. Keterlibatan Gereja dalam pembangunan budaya itu tentu saja bukan demi budaya itu sendiri, melainkan demi kemajuan dan perkembangan manusia sebagai subjek budaya (bdk. GS, 53). Politik budaya dalam kebijakan multikulturalisme (atau, lebih baik, interkulturalisme), yang menjadikan manusia sebagai tolok ukurnya, tentu akan memperkaya kehidupan dalam masyarakat majemuk ini. Sebaliknya, bila budaya-budaya suku bangsa dikembangkan demi budaya-budaya itu sendiri, akan berdampak pada eksklusivisme yang saling menyingkirkan: ini milikku, bukan milikmu; ini budayaku, bukan budayamu; ini hakku, bukan hakmu.

## **5. Agenda Bersama**

Sebagai bagian integral dari masyarakat Nusantara, Gereja telah diperkaya utamanya oleh budaya-budaya etnis yang ada di seluruh negeri lewat proses adaptasi dan adopsi nilai-nilai budaya itu. Penampilan Gereja dengan warna budaya-budaya lokal, mulai dari Keuskupan Agung Merauke di Papua, di Timur, sampai dengan Keuskupan Agung Medan di Sumatra Utara, di Barat, sangat warna-warni. Gereja mengekspresikan diri dalam nilai-nilai dan kearifan-kearifan budaya setempat. Tuntutan ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, dari anggota-anggota Gereja yang menghayati budaya leluhurnya.

### **5.1 Agama, budaya, komunitas pinggiran**

Sebaliknya, Gereja juga berpartisipasi dalam persoalan-persoalan masyarakatnya. Persoalan kemiskinan, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan berbagai isu penyakit masyarakat lainnya merupakan masalah-masalah yang harus ditanggapi oleh Gereja. Artinya, penderitaan kaum miskin dan minoritas-minoritas terpinggirkan diakui oleh Gereja sebagai bagian dari narasi hidup putra-putrinya sendiri. Sikap empati ini merupakan hasil internalisasi dari solidaritas Sang Sabda yang menjadi manusia dalam diri Kristus (Flp 3:6-8), yang datang untuk melayani seperti hamba (Yoh 13:13), untuk melayani dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Mat 20:28). Konsili Vatikan II dalam *Gaudium*

*et Spes*, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, merumuskan solidaritas sosial ini demikian:

Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tidak bergema di hati mereka (no. 1).

Dalam hal ini, pengertian budaya atau kebudayaan tidak dibatasi secara reduktif hanya pada ranah etnis semata-mata, tetapi juga mencakup cara berpikir dan berlaku kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat: kaum miskin, kelas menengah, kaum pekerja, kaum muda urban, kaum perantau, politisi, pedagang, dan seterusnya. Dalam arti tertentu, kelompok-kelompok sosial ini menghayati pola hidup yang disebut ‘budaya-budaya khusus’. Dalam arti ini, Gereja Indonesia ditantang untuk lebih dalam mengkritisi kebijakan multikultural, yang seringkali direduksi pada kultur-kultur etnis tradisional, dan beranjak ke interaksi antar berbagai kelompok sosial, yang terus berlipatganda sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia dalam abad ke-XXI, dengan ‘warna budayanya’ masing-masing.

## **5.2 Pendidikan persahabatan**

Untuk maksud itu, para pimpinan Gereja perlu mendukung pentingnya memajukan pendidikan interkultural dan menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan praktis. Intinya, pendidikan interkultural terarah pada pengembangan pemahaman akan keragaman budaya sedemikian rupa sehingga para peserta didik bisa mengembangkan kompetensi interkultural dalam pergaulan sehari-hari. Pendekatan ini mengondisikan kemungkinan terjadinya penyerbukan silang yang subur (lih. Rukmana dan Lembong eds., 2015).

Di banyak tempat di negeri ini, Gereja tidak melihat diri sebagai komunitas terpisah dari seluruh susunan masyarakat. Ini sejalan dengan nalar interkultural, di mana terjadi interaksi yang hidup antar berbagai unsur yang membentuk susunan budaya manusia. Meskipun harus diakui pula bahwa nalar multikultural yang mempertahankan segregasi antar kelompok-

kelompok sosio-kultural-religius juga dialami oleh sejumlah komunitas gerejawi. Hal ini tampak secara jelas, misalnya, ketika budaya lokal diklaim oleh kelompok tertentu. Artinya, komunitas-komunitas gerejawi dianggap sebagai ‘yang lain’ dan diperlakukan sebagai ‘yang asing’, sehingga mereka tidak mendapat akses sedikitpun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan budaya setempat.

Kondisinya menjadi lebih parah lagi, bila Gereja memandang dirinya sendiri sebagai ‘yang lain’ dalam budaya setempat. Hal ini terjadi, misalnya, bila anggota-anggota komunitas gerejawi di suatu tempat tidak memiliki ikatan darah atau genealogis dengan subjek-subjek pendukung budaya tersebut.

Melihat kekurangan-kekurangan seperti digambarkan di atas, kiranya tantangan Gereja dewasa ini justru dalam hal memajukan pendidikan interkultural. Angkatan muda perlu dibekali kompetensi-kompetensi interkultural (UNESCO, 2013) untuk menjadi fundamen bagi cara hidup yang terlatih dalam mencermati segala sesuatu dari berbagai perspektif. Pada gilirannya, kecakapan ini memampukan orang untuk berkontribusi dalam ‘memelihara dan mempromosikan keragaman budaya dan hak-hak azasi manusia’ (UNESCO, 2013:24).

*Multi perspective* seperti ini telah diupayakan di kampus STFT Widya Sasana – barangkali juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari system edukasi katolik – bisa dipromosikan dalam kurikulum di sekolah-sekolah, termasuk materi pelajaran dan metode pengajaran yang bebas dari mono-kulturalisme. Sasarannya ialah membekali generasi masa depan yang berkarakter interkultural dalam pergaulan dan persahabatan antar-budaya dan antar-bangsa (internasional). Ada berbagai mata pelajaran dan disiplin ilmu yang bisa presentasikan dengan pendekatan interkultural, seperti pengajaran bahasa-bahasa, ilmu-ilmu sosial (sosiologi, antropologi, psikologi), spiritualitas dan agama-agama, dan lain sebagainya disamping aktivitas-aktivitas ekstra-kurikuler. Intinya, angkatan muda perlu dibekali dengan polapikir dan polarasa multi-perspektif yang mencerahkan dan mencerdaskan, sehingga perilaku mereka pun diwarnai oleh nilai-nilai yang konstruktif.

Yang penting di sini tentu saja bukan hanya peran guru-guru, melainkan

juga sistem pendidikan yang dikelola oleh lembaga-lembaga gerejawi itu sendiri, baik yang dikelola oleh Keuskupan-keuskupan, Tarekat-tarekat religius, maupun oleh kaum awam. Kurikulum itu perlu disusun sedemikian rupa sehingga ke dalamnya terintegrasi nilai-nilai toleransi dan hormat terhadap perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan adat-istiadat lokal. Agaknya harus ditekankan lagi bahwa semua ini merupakan bagian dari ranah evangelisasi baru.

### **5.3 *Kerjasama terpadu***

Agenda lainnya adalah terus memajukan kerjasama dengan semua lembaga non-gerejawi dalam menangani persoalan-persoalan krusial yang dihadapi masyarakat di dalam negeri maupun internasional. Pada tingkat nasional, komisi-komisi di Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) – sebagaimana Seri Dokumentasi dan Informasi *Spektrum* dari Dokpen KWI memberitakannya secara berkala–sudah ada jejaring dengan berbagai lembaga lain yang mempunyai keprihatinan dan aksi nyata dalam memajukan persahabatan sesama manusia. Begitu juga berbagai komisi di tingkat Keuskupan-keuskupan, Tarekat-tarekat Religius, kaum awam (baik sebagai minat pribadi maupun kelompok yang terorganisasi) telah melakukan banyak terobosan kerjasama yang konstruktif. Kisah-kisah ini banyak menghiasi jurnal-jurnal gerejawi – paroki, keuskupan, tarekat-tarekat religius, lembaga-lembaga pendidikan Gerejawi lainnya. Revitalisasi upaya-upaya ini perlu diteruskan.

Gereja didorong untuk turut memajukan nilai-nilai budaya yang menjadi acuan dan milik bersama bangsa Indonesia. Yang dimaksudkan nilai-nilai budaya di sini adalah patokan penilaian atau pedoman etika dalam bertindak benar dan pantas bagi bangsa yang beradab. Nilai-nilai yang dimaksudkan ini terserap di dalam semua bidang kehidupan bersama dan menjadi pedoman pembenaran tindakan-tindakan sosial, ekonomi, politik, dan religius baik pribadi maupun bersama. Pancasila merupakan salah satu pedoman utama bagi seluruh warganegara untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dalam berinteraksi saling menghormati demi kebaikan bersama. Tentu saja ini merupakan pekerjaan rumah yang berat. Akan tetapi, tanggung jawab ini



harus direspon dengan penuh gairah oleh setiap orang beriman demi tujuan akhir, yakni kebahagiaan.

## 6. Penutup

Persahabatan merupakan salah satu nilai yang penting dalam peradaban manusia dan telah berabad-abad menjadi bahan renungan di antara komunitas-komunitas manusia yang mencari makna hidup bersama. Secara kristiani, persahabatan yang sejati itu difokuskan pada ‘yang lain’ (secara individual maupun bersama) dan kepada ‘Sang Lain’, yang menciptakan manusia menurut citra-Nya. Dimensi ilahi pada manusia ini merupakan dasar utama bagi konstruksi teologi persahabatan. Dan spiritualitas persahabatan ini perlu dihayati ‘dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan’ yang dianugerahkan Allah kepada tiap-tiap pribadi. Yesus Kristus sendiri adalah teladan sahabat dan persahabatan *par excellence*, seperti yang diwartakan oleh Perjanjian Baru.

Untuk membangun komunitas dengan peradaban yang lebih manusiawi – kesetaraan warga dan hak-hak kultural-religius komunitas-komunitas lokal dan mereka yang dimarginalkan, bersihnya lingkungan sosial dari segala ujaran kebencian dan provokasi yang memecah belah –di negeri ini, bangsa Indonesia membutuhkan transformasi secara mendalam. Spiritualitas persahabatan merupakan salah satu terobosan yang penting dan mendesak untuk maksud itu, yang bisa menjadi bagian esensial dari agenda Gereja. STFT Widya Sasana telah berusaha berkontribusi dalam pembinaan ‘karakter sahabat’ bagi semua anggota civitas akademiknya, agar kemudian bisa berpartisipasi dalam (re-) konstruksi peradaban baru, di mana semua orang adalah sahabat (*philos*) yang mencintai (*philein*) persahabatan (*philia*). Kearifan asali inilah, di mana setiap orang adalah sahabat bagi sesamanya (*homo homini amicus*) seperti dikatakan oleh Seneca (d. 65 AD), yang harus ditemukan kembali.

## KEPUSTAKAAN

Adian, Donny Gahral, “Multicultural Politics in Indonesia: Dialogue and Gotong Royong.” Dalam *Dialogue and Universalism*E (Vol. 2/N.

- 2/2011), <https://www.emporia.edu/~cbrown/dnue/archive/documents/Vol02.no02.Adian.pdf> (accessed January 05, 2016).
- Bamualin, Chaider S., Karlina Helmanita, Amelia Fauzia, E. Kusnadiningrat (eds.), *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Syarif Hidayatullah dan The Konrad Adenauer Foundation, 2002.
- Dahana, Radhar Panca, "Theology, Illusion and Bahari," paper dipresentasikan dalam *The International Joint Conference* di Kampus Sanata Dharma, Yogyakarta, 1-2 Februari 2019.
- Dokumen Konsili Vatikan II* (terj. R. Hardawirjana SJ), edisi kedelapan, Jakarta; Obor, 2004.
- Febriyani, Meri, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial*, Bandar Lampung: FH Universitas Lampung, 2018.
- Heller, Brittan and Larry Magid, "Combating Hate Speech," <https://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/2019/10/Hate-Speech-8.5x11.pdf> (diunduh, 28 Juni 2020).
- Irawan, "Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi," *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* (9/1 [2018]: 1-17), juga tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/285132-hate-speech-di-indonesia-a2b37139.pdf> (diunduh, 28 Juni 2020).
- Kristiyanto, A. Eddy, *Seandainya Indonesia tanpa Katolik. Jalan Merawat Ingatan*, Jakarta: Obor, 2015.
- Kymlicka, Will, *Multiculturalism Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford: Clarendon Press, 1998.
- Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta: Mizan, 2014.
- Liliweri, Alo, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, edisi kedua, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Moejanto, G., "Katolik dan Sejarah Demokrasi di Indonesia." Dalam M.

- Imam Aziz, M. Jadul Maula, Ellyasa KH Dharwis (eds.), *Agama, Demokrasi & Keadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, 202-213.
- Ningrum Dian Junita, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Korpus* vol. II, no. III (Desember 2018), 241-252; juga tersedia di <https://core.ac.uk/download/pdf/228584958.pdf> (diunduh 28 Juni 2020).
- Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia. Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Pálmadóttir, Jóna Aðalheiður and Iuliana Kalenikova, “Hate speech; an overview and recommendations for combating it,” Icelandic Human Rights Center, <http://www.humanrights.is/static/files/Skyrslur/Hatursraeda/hatursraeda-utdrattur.pdf> (diunduh, 28 Juni 2020).
- Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory*, Macmillan Press Ltd., 2000.
- Rukmana, Aan dan Eddie Lembong eds., *Penyerbukan Silang Antarbudaya: Membangun Manusia Indonesia*, Jakarta: Elex Media Kompatindo, 2015.
- Srinati, Dominic, *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer* (terj. Abdul Muchid), Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Storey, John, *Teori Budaya dan Budaya Pop. Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies* (terj. Dede Nurdin), Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Suparla, Parsudi, “Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia.” Dalam *Antropologi Indonesia* Tahun XXV, No. 66 (Sept-Des 2001), 1-12.
- Suparlan, Parsudi, “Masyarakat Majemuk dan Perawatannya.” Dalam *Antropologi Indonesia* Tahun XXIV, No. 63 (Sept-Des 2000), 1-14.
- Suparlan, Parsudi, “Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas,” <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Masyarakat->

*Majemuk-Masyarakat-Multikultural-dan-Minoritas-Memperjuangkan-Hak-hak-Minoritas.pdf* (diunduh, 28 Juni 2020).

Sutrisnaatmaka, A.M., “Budaya Kristiani, Budaya Indonesia dan Budaya Suku.” Dalam Komisi Teologi KWI, *Dialog Antara Iman dan Budaya*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2006, 95-121.

UNESCO, *Intercultural Competences. Conceptual and Operational Framework*, Paris: Unesco, 2013.

United Nations, “Strategy and Plan of Action on Hate Speech,” <https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf> (diunduh, 28 Juni 2020).

Vickers, Adrian, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani, 2011.

